

# Analisis Keputusan Australia Menjatuhkan Sanksi Kepada Fiji Pasca Kudeta Militer

I Putu Bagus Honestya<sup>1)</sup>, Sukma Sushanti<sup>2)</sup>, Adi P. Suwecawangsa<sup>3)</sup>  
<sup>123)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Honestya99@gmail.com<sup>1</sup>, sukmasushanti@gmail.com<sup>2</sup>, Adisuwecawangsa@yahoo.co.id<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This final assignment discusses about Australia's choice to decide the policy to impose sanctions on Fiji after the 2006 military coup. The Australian decision will be analyzed using the Foreign Policy Theory and the Rational Actor Model. The analysis within this final assignment will provide the reasons behind choosing policies to impose sanctions in response to a military coup in Fiji. The Rational Actor model is used to explain that Australia as a rational actor will choose the most strategic policy among various alternatives to achieve its national interests. The outcome of this research is a clear explanation about the reason that motivate Australia chose the option to impose sanctions on Fiji. After considering the costs and benefits of various alternative options available, the option to impose sanctions is the most suitable for Australia in response to the 2006 military coup in Fiji.*

**Keywords** : Australia, Fiji, Coup , Sanction

## 1. PENDAHULUAN

Kawasan Pasifik Selatan adalah kawasan yang sebagian terdiri dari negara – negara kepulauan dengan luas wilayah dan populasi yang kecil, hanya tiga negara yang memiliki daerah daratan yang luas yaitu Australia, Papua Nugini, dan Selandia Baru. Diantara negara – negara tersebut, Australia telah lama menjadi kekuatan utama di kawasan Pasifik Selatan. Australia merupakan negara yang mempunyai kekuatan dibidang sosial, ekonomi, militer dan politik yang cukup besar untuk memberikan pengaruh di kawasan Pasifik Selatan (Barnadetha, 2013). Australia sebagai aktor utama di kawasan Pasifik Selatan memiliki perhatian khusus terhadap

stabilitas di regional tersebut, karena Pasifik Selatan merupakan wilayah yang sangat strategis dalam kaitannya dengan politik luar negeri Australia (M. Shephard, 2009). Perhatian khusus ini dengan mudah dapat terlihat dari upaya – upaya Australia dalam menjaga stabilitas di kawasan. Misalnya pada tahun 2003 Australia mengerahkan pasukan militer ke Kepulauan Solomon untuk menyelesaikan instabilitas yang disebabkan oleh konflik antaretnis, Tahun 2006 Australia juga melakukan intervensi militer di Timor Leste, dan terakhir kudeta di Fiji pada tahun 2006. Tidak seperti kasus di Kepulauan Solomon dan Timor Leste, dalam upaya

menjaga stabilitas Fiji pasca kudeta militer, Australia menggunakan pendekatan berbeda yaitu menggunakan Sanksi.

Fiji merupakan pusat dari perdagangan, transportasi dan pelayanan pendidikan bagi negara – negara disekitarnya. Suva yang merupakan ibu kota Fiji adalah rumah bagi Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik dan sejumlah lembaga regional yang penting. Suva juga merupakan tempat berdirinya kampus Universitas Pasifik Selatan yang melayani hingga 10.000 siswa dari dua belas Negara-negara Kepulauan Pasifik. Berbagai hal yang telah disebutkan diatas membuat isu apapun yang terjadi di Fiji akan memberi dampak bagi negara disekitarnya (Pareti, 2009). Oleh karena itu Australia memiliki ketertarikan dengan Fiji. Australia sejauh ini merupakan investor terbesar di Fiji, dengan nilai total investasi diperkirakan hingga 2 miliar dollar Australia (Australia-Fiji Business Council, 2009). Investasi Australia di Fiji terbagi dalam beberapa sektor, seperti perbankan, keuangan, asuransi, layanan hukum, pariwisata, transportasi, logistik dan manufaktur.

Hubungan Australia dan Fiji mulai merenggang setelah terjadinya kudeta pada tahun 2006. Perdana Menteri Qarase digulingkan oleh Panglima RFMF ( The Republican of Fiji Military Forces) Frank Bainamarama melalui kudeta pada 5 Desember 2006 (DW, 2005). Selain itu, Bainamarama dengan dukungan Presiden Iloilo kemudian membubarkan pengadilan, membatalkan Konstitusi Fiji 1997 dan

menunda pemilihan demokratis hingga September 2014 yang awalnya dijanjikan akan diadakan tahun 2009. Rangkaian peristiwa yang terjadi di Fiji mulai dari terjadinya kudeta militer dan ditundanya pemelihan umum oleh Frank Bainamarama mendapatkan respon dari dunia internasional, termasuk Australia (Perry, 2007).

Australia menganggap kudeta militer di Fiji telah melanggar asas demokrasi. Selain itu, Australia khawatir bahwa kudeta yang terjadi di Fiji dapat menginisiasi tindakan serupa di negara lain yang dapat membuat Australia terancam secara ekonomi maupun geopolitik (Dany & Saiman, 2015).

Pada awal terjadinya kudeta, Perdana Menteri Fiji, Laisenia Qarase meminta bantuan pasukan militer Australia untuk melakukan intervensi. Permintaan intervensi pasukan militer ini ditujukan untuk membantu pemerintah Fiji dalam menghadapi kudeta militer yang dipimpin oleh Frank Bainimarama, namun permintaan tersebut ditolak oleh Perdana Menteri John Howard (Dani Rukma, 2013). Padahal, dengan power yang dimiliki Australia, bukanlah hal yang sulit untuk menyelesaikan isu kudeta di Fiji melalui jalan intervensi militer.

Stabilitas kawasan Pasifik Selatan memiliki peranan yang penting dalam keamanan nasional Australia. Atas dasar tersebut, Australia kerap membuat kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk menjaga kepentingannya di kawasan Pasifik Selatan, Contohnya seperti melakukan intervensi militer terhadap negara-negara Pasifik Selatan

yang memiliki permasalahan instabilitas internal di negaranya. Namun sikap aktif dan responsif Australia tersebut tidak tampak dalam instabilitas internal yang terjadi di Fiji yang terjadi dalam bentuk kudeta militer. Australia menolak melakukan intervensi militer pada empat kali kudeta yang terjadi di Fiji, termasuk dalam kasus kudeta tahun 2006. Keputusan Australia dalam menjatuhkan sanksi tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan alasan Australia memilih keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada Fiji dari tahun 2006 sampai 2009.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Penulis menggunakan dua tulisan sebagai kajian pustaka. Tulisan pertama penulis menggunakan tulisan dari Michael F. Martin (2015) yang berjudul *U.S. Sanctions on Burma*. Tulisan Martin (2015) menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri AS yaitu melakukan promosi demokrasi. Promosi demokrasi di Burma dilakukan AS diantaranya dengan menggunakan pendekatan koersif yang berupa sanksi seperti larangan visa, pembatasan layanan keuangan, larangan untuk impor barang Burma, larangan investasi baru di Burma, dan dikurangnya bantuan AS ke Burma. Sanksi ini menurut Martin (2015) bertujuan menekan pemerintahan junta militer Burma berubah menjadi pemerintahan yang demokratis.

Tulisan Martin (2015) membantu menguatkan justifikasi penulis bahwa situasi internasional seperti berkuasanya rezim militer pada negara lain sangat mungkin menjadi

faktor suatu negara untuk melakukan intervensi terhadap negara lain melalui kebijakan luar negeri demi mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam tulisan Martin (2015) dijelaskan bahwa berkuasanya rezim militer di Burma menjadi motivasi AS untuk mengenakan sanksi untuk menekan Burma menjadi negara yang demokratis demi mencapai kepentingan nasionalnya. Namun tulisan Martin (2015) belum menjelaskan bahwa keputusan suatu negara dalam membuat kebijakan luar negeri sebagai suatu yang rasional. Oleh karena itu peneliti menambahkan tulisan Rabia Akhtar (2003) yang berjudul *Nuclearization of Pakistan: Motivations and Intentions* sebagai kajian pustaka.

Rabia Akhtar (2003) menjelaskan dalam tulisannya mengenai keputusan Pakistan dalam kebijakannya melakukan uji coba enam termonuklir sebagai tanggapan terhadap uji coba nuklir yang dilakukan India pada tahun 1998. Pada awalnya Komunitas Internasional telah memperingatkan akan menjatuhkan sanksi terhadap Pakistan apabila negara tersebut juga melakukan uji coba nuklir sebagai respon balasan atas tindakan India. Namun pada akhirnya Pakistan memutuskan untuk tetap melakukan uji coba nuklirnya. Pada saat memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir, Pakistan menyadari bahwa sanksi nuklir dan ancaman isolasi dari Komunitas Internasional akan menyebabkan kerugian lebih besar terhadap Pakistan daripada India.

Rabia Akhtar (2003) menjelaskan keputusan Pakistan untuk meledakkan

perangkat nuklirnya menimbulkan berbagai pertanyaan. Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut terhadap perekonomian di Pakistan, penting untuk memahami mengapa keputusan untuk mengikuti jejak tes nuklir India ini diambil. Untuk menjawab pertanyaan ini, Rabia Akhtar (2003) menggunakan model-model Graham Allison, salah satunya Rasional Aktor Model untuk pengambilan keputusan rasional dalam kasus *nuclearization* Pakistan dan menentukan apa yang memotivasi Pakistan untuk tetap melakukan uji coba nuklir dan bagaimana mereka mampu melakukannya.

Dari dua tulisan diatas, penelitian ini mengambil dua konsep sebagai kerangka pemikiran yaitu: Teori Politik Luar Negeri dan Model Aktor Rasional. *Teori Politik Luar Negeri* digunakan untuk membantu menjelaskan bahwa faktor internasional seperti perbedaan rezim dengan negara lain dapat menjadi motivasi suatu negara untuk membuat kebijakan luar negeri yang bertujuan melakukan intervensi terhadap urusan internal negara lain. Model aktor rasional digunakan untuk menjelaskan bahwa negara sebagai aktor rasional akan memilih membuat kebijakan atau keputusan yang memiliki resiko paling rendah dalam mencapai tujuannya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian eksplanatif kualitatif. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis terhadap alasan yang mendasari dari suatu fenomena atau

kejadian (Vaus 2001, p.1). Penelitian ini menggunakan unit analisis negara, maka dari itu penulis menggunakan sumber data sekunder. Data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber dokumentasi baik berupa laporan, arsip atau dokumen pemerintah/swasta, data dalam website, dan laporan penting lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data mengenai permasalahan dengan mengulas literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Data – data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dilengkapi dengan grafik, foto dan gambar.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Australia Sebagai Kekuatan Regional Pasifik Selatan**

Australia sering disebut sebagai kekuatan utama utama dari regional Pasifik Selatan. Dalam menentukan power dari sebuah negara, terdapat beberapa pandangan dari para ahli Hubungan Internasional. Menurut Nye, konstituen power terdiri atas jumlah populasi, teritorial, sumber daya alam, kapabilitas ekonomi dan militer, serta stabilitas sosial (Nye, 2004). Pada bagian berikutnya

akan dibahas mengenai kekuatan Australia dilihat dari indikator-indikator konstituen power ini.

Pertama, dari segi jumlah populasi. Australia memiliki jumlah populasi yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Pasifik, yang kebanyakan tergolong sebagai *microstates*. Jumlah populasi menjadi determinan kekuatan negara yang penting karena populasi tidak serta-merta dilihat sebagai perhitungan angka saja, tetapi didalamnya juga terkandung perhitungan keahlian dan kualitas sumber daya manusia suatu negara.

Kedua, dari segi luas teritorial wilayah. Hal ini menyangkut ukuran luas wilayah dan lokasi. Jika diukur dengan determinan teritorial, Australia juga memiliki keunggulan yang jauh, karena memiliki wilayah negara yang paling luas diantara negara-negara di kawasan ini. Bahkan Australia sering disebut sebagai pulau benua. Luas wilayah lautnya juga cukup luas, meliputi Laut Koral dibagian Utara dan Laut Tasman dibagian Selatan ditambah dengan lokasi strategisnya yang terletak antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kombinasi antara luas wilayah dan lokasi ini membuat Australia *superior* dalam determinan teritorial.

Ketiga, dari segi sumber daya alam. Australia adalah negara yang memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat dan melimpah. Sumber daya alam mineral Australia yang menghasilkan pendapatan negara yang cukup signifikan antara lain adalah batubara, bijih besi, tembaga, emas,

gas alam, uranium, timah, mangan, bauksit, magnesit, lithium, nikel, dan sumber-sumber energi terbarukan lainnya (Geoscience Australia, n.d).

Keempat, dilihat dalam kekuatan ekonomi dan militer. Australia tergolong sebagai negara maju dengan PDB atau GDP sebesar 1.372 triliun dollar Amerika Serikat pada tahun 2011 yang lalu, dan menempati peringkat ke 13 dalam ranking negara-negara dengan PDB terbesar di dunia. Pendapatan per kapitanya mencapai 40.800 dollar AS. Pendapatan ekspor Australia tahun 2011 mencapai 272.1 milyar dollar AS, terutama dari bidang pertambangan dan agrikultur.

Penjabaran mengenai jumlah populasi, luas wilayah, sumber daya alam, kekuatan ekonomi dan militer, serta stabilitas sosial yang dimiliki oleh Australia yang lebih maju dibandingkan negara – negara kepulauan disekitarnya merupakan faktor – faktor yang membuat Australia menjadi kekuatan utama atau juga disebut di kawasan Pasifik Selatan atau juga disebut *Regional Power*.

#### **4.2. Signifikansi Posisi Fiji Bagi Australia**

Fiji secara tradisional dianggap sebagai pusat Pasifik. Markas besar dari sebagian besar organisasi regional Pasifik Selatan, badan-badan PBB yang berbasis di Pasifik Selatan dan misi diplomatik berbasis di Fiji. Fiji merupakan pusat dari perdagangan, transportasi dan pelayanan pendidikan bagi negara – negara disekitarnya. Rute laut dan udara trans-Pasifik melewati Fiji, dan

beberapa negara tetangga kecil (seperti Tuvalu dan Kiribati) bergantung pada Fiji sebagai titik *transshipment* untuk perdagangan mereka dengan dunia luar (Tarte Sandra, 2010).

Fiji memiliki pusat penerbangan dan pelabuhan yang memiliki fungsi central di kawasan. Fiji merupakan pusat penerbangan untuk kawasan tersebut. Sejumlah maskapai penerbangan menyediakan layanan internasional melalui bandara Nadi, termasuk Qantas, Air Pacific, Air New Zealand, Korean Airlines, dan sejumlah maskapai Kepulauan Pasifik (FTIB, 2009). Pelabuhan Fiji adalah persimpangan penting untuk layanan pengiriman antara Amerika Utara, Asia, Australia, Selandia Baru dan negara-negara kepulauan. Dua kota terbesar di Fiji, Suva dan Lautoka, memiliki pelabuhan pengiriman-penting untuk wilayah Kepulauan Pasifik. Fiji akan menjadi pusat dari inisiatif pembelian minyak curah yang diusulkan Forum Kepulauan Pasifik, yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari harga minyak yang tinggi di wilayah tersebut. Inisiatif ini akan lebih sulit untuk dilaksanakan tanpa Fiji (Pareti, 2009). Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Fiji memiliki nilai strategis bagi Australia baik dalam bidang pertahanan maupun ekonomi, sehingga membuat Australia melakukan investasi dan kerja sama dengan Fiji.

Australia merupakan negara pendonor bantuan terbesar untuk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan termasuk Fiji. Salah

satu sektor yang menjadi fokus Australia adalah bantuan dalam bidang pertahanan. Selain kerja sama dalam bidang pertahanan, Australia dan Fiji juga merupakan partner dalam perdagangan. Kerja sama eksor-impor antara dua negara ini mendekati nilai 1,4 miliar tiap tahunnya. Tahun 2006, Australia merupakan tujuan ekspor terbesar dan sumber impor kedua terbanyak bagi Fiji. Perdagangan barang-barang diantara keduanya pada tahun 2006-2007 mencapai 531 juta dolar (ekspor Australia ke Fiji 383 juta dolar:ekspor Fiji ke Australia 148 juta dolar) Ekspor Fiji ke Australia mencapai 13,8% dari seluruh total ekspor Fiji. Sedangkan impor Fiji dari Australia mencapai 23,3%. Selain itu, Australia juga merupakan negara yang paling berjasa bagi Fiji terutama dalam hal pembangunan ekonomi Fiji. Sejauh ini Australia merupakan investor asing terbesar di Fiji (Australia DFAT, 2009).

#### **4.3. Analisis Kebijakan Australia Sebagai Respon Australia Terhadap Kudeta Militer di Fiji Tahun 2006**

Penting bagi Australia untuk menjaga hubungan baik dengan Fiji karena Fiji secara tradisional dianggap sebagai pusat Pasifik seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, namun kerja sama kedua negara terganggu setelah terjadinya kudeta militer di Fiji pada tahun 2006. Pada awal terjadinya kudeta di tahun 2006, Perdana Menteri Fiji, Laisenia Qarase pernah

meminta bantuan pasukan militer Australia untuk melakukan intervensi. Permintaan intervensi pasukan militer ini ditujukan untuk membantu pemerintah Fiji dalam menghadapi kudeta militer yang dipimpin oleh Frank Bainimarama, namun permintaan tersebut ditolak oleh Perdana Menteri John Howard (Dani Rukma, 2013). Australia mengupayakan suatu cara selain intervensi melalui militer sebagai respon atas terjadinya kudeta militer di Fiji tahun 2006.

#### **4.3.1. KEBIJAKAN AUSTRALIA MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP FIJI**

Dalam kepentingannya menekan rezim militer untuk segera melakukan pemilu dan mengembalikan Fiji ke jalur demokratis, Australia menolak menggunakan pendekatan melalui jalan militer. Australia memutuskan untuk menjatuhkan sanksi diplomatik, militer, dan ekonomi.

Sanksi diplomatik dilakukan dengan beberapa cara oleh Australia. Pertama dengan memberlakukan travel ban ke Australia terhadap orang-orang yang terkait dengan kudeta, yang kemudian diperluas untuk mencakup semua orang yang menerima posisi senior dalam pemerintahan baru, militer, peradilan, dan anggota keluarga dekat mereka. Laporan media menunjukkan bahwa langkah-langkah ini memberikan efek frustrasi pada rezim, karena banyak diantara elite kepemimpinan memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Australia (Clark, 2000). Lalu pada tingkat

multilateral, Australia mengeluarkan Fiji dari keanggotaan *Pacific Island Forum* dan *Commonwealth*. Hal ini membuat Fiji tidak dapat menerima bantuan apapun dari dua organisasi multilateral tersebut.

Australia juga melakukan pendekatan melalui ancaman sanksi ekonomi. Pertama Australia mengancam akan mengeluarkan Fiji dari *Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER)*. Kedua Australia mengeluarkan *Tourism Warning* bagi warga negaranya untuk mengunjungi Fiji. Perlu diketahui bahwa Fiji telah bergantung pada sektor pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang signifikan sejak tahun 1960-an (Narayan, 2000).

Selain menjatuhkan sanksi diplomatik dan ekonomi, Australia juga menjatuhkan sanksi militer. Sanksi militer berupa pemberhentian kerja sama pertahanan antara Australia dengan Fiji. Kerja sama tersebut diantaranya pertukaran intelijen, pelatihan untuk personel militer, pengawasan udara Fiji, dukungan teknis untuk operasi kapal patroli Fiji (disediakan oleh Australia), serta latihan perahu patroli regional (Tarte, 2010). Pada tingkat global, Australia telah berupaya keras melakukan negosiasi agar pasukan Fiji dilarang ikut serta dalam operasi pemeliharaan perdamaian yang disetujui PBB. Lalu pada bulan April 2009, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengumumkan bahwa pasukan Fiji tidak lagi dipertimbangkan untuk ditempatkan dalam operasi PBB yang baru (McGuirk, 2009).

#### **4.3.2. Analisis Kebijakan Australia Menggunakan Model 1 : Model Aktor Rasional**

Dalam upaya penulis untuk menganalisis kenapa Australia menggunakan kebijakan sanksi, penulis akan mengikuti empat prinsip dasar seperti yang diusulkan oleh Allison dalam Model Aktor Rasional. Allison mengemukakan empat prinsip dasar yang membentuk Model Aktor Rasional, yaitu: Tujuan dan Sasaran, Alternatif, Konsekuensi dan Pilihan. Menurut Allison, dalam membuat sebuah kebijakan, aktor rasional akan dihadapkan pada berbagai alternatif kebijakan. Aktor rasional diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia. Alternatif inilah yang akan digunakan untuk mengalkulasi konsekuensi berupa untung dan rugi apabila kebijakan tersebut dipilih (Allison, dalam Mintz dan DeRouen 2010).

- **TUJUAN DAN SASARAN**

Prinsip ini mengacu pada kepentingan dan nilai-nilai dari negara pembuat kebijakan yang diterjemahkan kedalam hasil atau fungsi utilitas atau preferensi, yang mewakili keinginan atau utilitas dari serangkaian konsekuensi alternatif (Allison G. & Zelikow P. 1999). Dalam membuat kebijakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Fiji, Australia memiliki kepentingan tertentu yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut.

Secara garis besar Australia memiliki beberapa kepentingan dalam intervensinya terhadap Fiji sebagai sebuah kekuatan hegemonik di kawasan Pasifik Selatan. Pertama, Australia ingin mengembalikan Fiji ke jalan demokratis karena Australia mempercayai nilai-nilai demokrasi dapat menciptakan keamanan serta memajukan kawasan pasifik selatan. Kedua, Australia ingin menjaga keamanan maritim di Pasifik Selatan khususnya di Fiji, karena Fiji merupakan salah satu jalur perdagangan yang digunakan Australia dalam kegiatan ekspor/impor dari dan menuju Amerika Serikat. Ketiga, Australia ingin mencegah lebih jauh masuknya pengaruh Cina di kawasan Pasifik Selatan yang memanfaatkan momentum terjadinya gejolak politik di Fiji. Berdasarkan kepentingan – kepentingan inilah Australia memutuskan melakukan intervensi terhadap gejolak politik di Fiji.

- **ALTERNATIF**

Menganalisis opsi yang tersedia untuk Australia adalah langkah selanjutnya dalam menerapkan Model Aktor Rasional. Australia sebagai negara hegemonik di kawasan Pasifik Selatan memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan berbagai konflik yang menyebabkan instabilitas di kawasan, termasuk kudeta militer di Fiji tahun 2006. Selain itu Australia juga memiliki kepentingan tersendiri untuk melakukan intervensi dalam menyelesaikan konflik didalam kedaulatan Fiji.

Dalam menganalisis respon Pemerintah Australia terhadap kudeta militer di Fiji, ada baiknya mempertimbangkan opsi-opsi tradisional dalam hubungan internasional yang tersedia sebagai tanggapan terhadap penggulingan ilegal pemerintah terpilih, yaitu ;

Pertama, *do nothing* atau mendiamkan konflik di Fiji, kedua, melakukan intervensi militer langsung untuk memulihkan pemerintah terpilih, dan terakhir melakukan intervensi melalui pengenaan sanksi ekonomi, perdagangan dan olahraga, pembekuan aset warga negara Fiji atau pembatasan bisnis dan pariwisata (Peter Brown, 2009).

- **KONSEKUENSI**

Ketiga opsi yang telah disebutkan di atas memiliki konsekuensi berbeda dengan kelebihan dan kekurangan. Penulis akan menguraikan opsi-opsi ini secara lebih rinci, menyajikan analisis cost and benefit dalam setiap opsi yang diberikan.

- a. Opsi Pertama : Do Nothing atau Tidak Melakukan Tindakan Apapun**

Opsi pertama yang selalu ada dalam kasus apa pun adalah tidak melakukan tindakan apa-apa, jadi ini juga berlaku dalam kasus Australia dengan Fiji. Jika Australia memilih opsi ini, maka Australia akan dihargai oleh rezim Frank Bainamarama karena Australia tidak mencampuri urusan domestik negara lain.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama antarnegara yang berkaitan dengan Piagam PBB. Piagam PBB dalam pasal 2 (4) dan 2 (7) jelas menyatakan bahwa hubungan antar-negara tidak diperbolehkan adanya intervensi.

Opsi ini memiliki dua kelemahan. Pertama, apabila Australia tidak melakukan tindakan apapun dikhawatirkan gejolak politik yang sedang terjadi di Fiji tidak akan segera terselesaikan. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Pasifik Selatan. Kedua, apabila ketidakstabilan yang sedang berlangsung di Fiji tidak segera diselesaikan, maka akan mengancam reputasi bagi kepemimpinan politik Australia di wilayah tersebut. Amerika Serikat dan Uni Eropa meminta Australia untuk menyelesaikan masalah di Pasifik Selatan (Maynard, 2006).

- b. Opsi Kedua : Melakukan Intervensi Militer Langsung Untuk Memulihkan Pemerintah Terpilih**

Opsi untuk melakukan intervensi militer di Fiji memiliki kelebihan. Pertama, dengan besarnya kekuatan militer dan banyaknya pengalaman Australia dalam resolusi konflik dinilai dapat menekan rezim militer Fiji untuk mundur. Kedua, intervensi militer terhadap Fiji akan secara dramatis mengurangi terulangnya konflik serupa yang diakibatkan oleh kudeta oleh pihak

militer khususnya di negara – negara Pasifik dan meyakinkan negara lain (terutama sekutu barat) keamanan di wilayah tersebut karena takut akan mendapatkan respon serupa apabila terjadi kudeta militer di negaranya. Lebih jauh, intervensi militer terhadap Fiji akan menunjukkan tekad dan komitmen Australia dan komunitas internasional terhadap tekad Australia untuk menjaga stabilitas di kawasan Pasifik Selatan.

Opsi ini memiliki kelemahan, pertama apabila Australia melakukan intervensi melalui militer akan mengakibatkan Australia menuai banyak kecaman dari masyarakat internasional yang menyatakan bahwa kehadiran Australia dan pasukannya di Fiji adalah sebuah intervensi terhadap kedaulatan sebuah negara. Kedua, intervensi bersenjata dinilai hanya akan mengakibatkan sikap rezim militer semakin keras melawan tekanan Australia dan membuat rezim militer pada akhirnya memperoleh dukungan publiknya (Fraenkel, 2006). Kemudian intervensi militer menelan biaya yang tidak sedikit, dan dikhawatirkan hanya akan menimbulkan kerugian dan korban pada kedua belah pihak karena dikhawatirkan rezim militer akan melawan.

### **c. Opsi Ketiga : Melakukan Intervensi Melalui Pengenaan Sanksi**

Opsi ini memiliki keuntungan sebagai berikut. Pertama, opsi ini dapat menunjukkan komitmen Australia terhadap mitranya di

komunitas Internasional dalam menciptakan kedamaian dan stabilitas di kawasan Pasifik Selatan tanpa menggunakan kekuatan militernya. Kedua, opsi menjatuhkan sanksi akan dengan jelas menyatakan tekad Australia untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas di kawasan dan membuat negara lain di kawasan takut mengalami hal serupa. Ketiga, opsi ini dapat mengurangi pengaruh Fiji di kawasan Pasifik Selatan.

Opsi ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, opsi ini memiliki presentase keberhasilan yang kecil dalam menyelesaikan suatu konflik. Para ilmuwan politik mengatakan bahwa sanksi tidak terlalu efektif. Menurut sebuah penelitian penting, sanksi hanya memiliki peluang 30 persen untuk berhasil. Kedua, yaitu dampak yang diakibatkan oleh pemberian sanksi paling sering dirasakan oleh warga sipil yang tidak bersalah dan bukan pejabat pemerintah yang dimaksud (Cashen, 2017).

#### **• Choice atau Pilihan**

Setelah mempertimbangkan cost and benefit dari tiga alternatif yang ada, Australia memilih opsi ketiga, intervensi melalui pengenaan sanksi sebagai pilihan untuk mengatasi krisis di Fiji pasca terjadinya kudeta militer. Menjadi sangat menarik ketika melihat Australia memilih opsi untuk menjatuhkan sanksi ketika pemberian sanksi itu sendiri memiliki tingkat

keberhasilan kecil dalam menyelesaikan suatu konflik.

Australia harus mempertimbangkan konsekuensi serta keuntungan masing – masing dari setiap opsi tersebut. Pertama, dengan tidak melakukan tindakan apapun maka Australia akan dianggap telah menghargai kedaulatan Fiji karena tidak mencampuri urusan di dalam kedaulatan negara lain, namun sebagai konsekuensinya apabila Australia yang dianggap pemimpin di kawasan Pasifik Selatan tidak segera merespon konflik di Fiji, dikhawatirkan konflik tersebut tidak akan segera terselesaikan dan akan mengancam reputasi bagi kepemimpinan politik Australia di wilayah tersebut.

Opsi kedua yaitu melakukan intervensi militer secara langsung. Opsi ini dinilai sebagai solusi tepat yang dalam hal ini dapat menyelesaikan konflik dengan cepat, daripada dengan pilihan lainnya, namun opsi memiliki konsekuensi tersendiri. Intervensi bersenjata dikhawatirkan hanya akan mengakibatkan sikap rezim militer semakin keras melawan tekanan Australia dan membuat rezim militer pada akhirnya memperoleh dukungan publiknya. Intervensi militer memerlukan biaya yang tidak sedikit dan dikhawatirkan menimbulkan korban jiwa pada kedua belah pihak. Intervensi bersenjata juga dinilai dapat membuat Australia menuai kecaman dari dunia Internasional.

Terakhir Australia dapat menggunakan opsi melakukan Intervensi melalui pengenaan sanksi ekonomi, perdagangan dan olahraga penuh, pembekuan aset warga negara Fiji atau pembatasan bisnis dan pariwisata. Opsi ini memiliki kelebihan bila diterapkan di Fiji, mengingat Fiji sangat bergantung atas Australia terutama dari segi ekonomi dan pariwisata. Dengan dijatuhkannya sanksi terhadap Fiji diharapkan dapat menekan rezim militer Fiji untuk turun dan segera kembali ke jalan demokratis. Selain itu opsi ini dianggap menghabiskan biaya lebih rendah dan memiliki resiko yang kecil dalam upayanya mengintervensi kudeta militer di Fiji, namun opsi juga memiliki kelemahan. Opsi ini memiliki kemungkinan keberhasilan yang kecil hanya 30% dalam menyelesaikan konflik, selain itu opsi ini dikhawatirkan hanya akan menambah penderitaan rakyat Fiji karena pemberian sanksi paling sering dirasakan oleh warga sipil yang tidak bersalah dari pada pemerintah berkuasa yang menjadi target sebenarnya pemberian sanksi ini.

Berdasarkan pertimbangan cost and benefit dari masing – masing ketiga opsi yang dijelaskan di atas, Australia sebagai aktor rasional akan memilih opsi yang memberikan kerugian atau konsekuensi paling rendah untuk Australia. Pada akhirnya Australia memilih opsi ketiga untuk melakukan intervensi dengan menggunakan cara menjatuhkan sanksi

sebagai opsi yang paling cocok digunakan untuk mewujudkan goals and objective dan memiliki konsekuensi atau resiko paling sedikit.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keputusan Australia memilih menjatuhkan sanksi kepada Fiji bila dianalisis menggunakan model aktor rasional dipengaruhi oleh keuntungan serta konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan yang tersedia. Setelah mempertimbangkan konsekuensi dari setiap opsi yang tersedia, pada akhirnya Australia memilih menggunakan opsi yang ketiga, yaitu mengenakan sanksi terhadap Fiji. Australia menilai penggunaan sanksi lebih cocok digunakan daripada intervensi militer atau tidak melakukan tindakan apapun. Mempertimbangkan intervensi militer hanya dibenarkan bila terbukti terjadi pelanggaran HAM yang berat dan hanya akan membuat citra Australia menjadi buruk di dunia Internasional apabila Australia memutuskan untuk memilih opsi tersebut. Opsi untuk tidak melakukan tindakan dinilai dapat membuat citra Australia sebagai negara hegemon di Pasifik Selatan menjadi buruk karena tidak bisa menjaga stabilitas di kawasan. Pada akhirnya Australia sebagai aktor rasional memilih opsi yang memiliki resiko atau konsekuensi paling sedikit untuk mewujudkan goals and objective-nya yang jatuh pada opsi ketiga yaitu melakukan

intervensi dengan menggunakan cara menjatuhkan sanksi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Ebook :

Akhtar Rabia, 2003. *Nuclearization of Pakistan: Motivations and Intentions*. Masters Theses. 1369. Diakses pada halaman website <http://thekeep.eiu.edu/theses/1369> pada tanggal 20 September 2018.

Amstutz, Mark R. *International Conflict and Cooperation: an introduction to world politics*. McGraw Hill. 1998. Hal 175

Ardiyah Leatemia, 2013. *Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional*. Lex et Societatis, Vol. I/No. 4/Agustus/2013

Australia Departement of Forreign Affairs and Trade. *Republic of Fiji Country Island Brief*. Diakses pada halaman <[http://www.dfat.gov.au/geo/fiji/fiji\\_brief.html](http://www.dfat.gov.au/geo/fiji/fiji_brief.html)> Diakses pada tanggal 19 September 2018.

Australia-Fiji Business Council, Estimate of Australian investment in Fiji. Personalcommunication to author, 2009.

Australian Government – Department of Defence, “*Defence Budget Overview, 2010-11*,” <http://web.archive.org/web/20110516044750/http://www.minister.defence.gov.au/FaulknerTpl.cfm?CurrentId=10273>, diakses pada Selasa, 11 Desember 2012, pukul 21:40 WIB

Australian Government – Geoscience Australia, “Australia’s Identified Mineral Resources,” <http://www.australianminesatlas.gov.au/aimr/index.html>, diakses pada 12 maret 2019.

- Barnadetha Indreswari W, 2013. *Peran Australia Dalam Menanggulangi Konflik Etnis Di Kepulauan Solomon*. Diakses melalui website <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20351774-TA> <[Bernadetha%20Indreswari%20Wisnuputri.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20351774-TA)> pada tanggal 25 September 2018.
- Barrie K. Macdonald, Sophie Foster. *Fiji Government and Society*. Diakses pada halaman website <<http://www.britannica.com/place/Fiji-republic-Pacific-Ocean/Government-and-society>> diakses pada 9 September 2019.
- Barry Kolodkin, 2018. *Examples of Sanctions in International Relations*. Diakses pada halaman web <<https://www.thoughtco.com>> pada 31 Maret 2019.
- Bonnie Malkin, 2009. *Fiji's president sacks all judges after court declares government illegal*. diakses dari halaman website <<https://www.telegraph.co.uk>> pada tanggal 20 september 2018.
- Cashen, Emily. "The Impact of Economic Sanctions." WorldFinance.com. 20 April 2017.
- Charles Hawksley. 2009. *Australia's Aid Diplomacy and the Pacific Islands: Change and Continuity in Middle Power Foreign Policy*. Global Change, Peace and Security, vol. 21, no. 1 (February 2009), p. 121.
- Colonel Peter Brown, 2009. Australian Influence in the South Pacific. published in the ADF Journal, Issue No. 189 (November/ December 2012), pp. 66-78.
- Daniel Flitton, 'Setback for Pacific Trade Deal', The Age, 1 August 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 February 2008
- Downer, A. (2006, December 6). *Response to Fiji Coup*. Media release. Didapatkan pada halaman website <[http://www.foreignminister.gov.au/releases/2006/fa135\\_06.html](http://www.foreignminister.gov.au/releases/2006/fa135_06.html)> pada tanggal 21 september 2018.
- Fiji Trade and Investment Bureau. *Investing in Fiji: communications*, 2009: <http://www.ftib.org.fj/fijicomcommunications.cfm>.
- Greg Colton, 2018. diakses pada halaman web <<https://www.lowyinstitute.org>> pada tanggal 29 Maret 2019 halaman
- Gregory E. Fry. 1996. *Framing the Islands Knowledge and Power in Changing Australian Images of The South Pacific*. Department of International Relations Working Paper no.1996/5 (Canberra: Australian National University, 1996), p. 2.
- Helen Clark, 2006. *NZ imposes wide range of sanctions on Fiji*. diakses pada halaman web <<https://www.beehive.govt.nz/release/nz-imposes-wide-range-sanctions-fiji>> pada tanggal 19 September 2018.
- Hoadley, Stephen. 2005. *Pacific Island Security Management by New Zealand & Australia: Toward a New Paradigm*. New Zealand: Center for Strategic Studies, 2005.
- Ilaitia S. Tuwere, 2007. *Land: A Fijian Perspective, Dalam Majalah Concilium* (Inggris), Conc (I), London: SCM Press, 2007, hlm. 79.
- Indra Saputra, n.d. *Arah Politik Luar Negeri Australia Masak Kini*. Diakses pada halaman <[https://www.academia.edu/5306893/ARAH\\_POLITIK\\_LUAR\\_NEGERI\\_AUSTRALIA\\_MASA\\_KINI](https://www.academia.edu/5306893/ARAH_POLITIK_LUAR_NEGERI_AUSTRALIA_MASA_KINI)>110.

- Jenny Hayward, Jones. 2009. *Fiji The Flailing State*. Lowy Institute For Interational Policy.
- Joanne Wallis (2015) *The South Pacific: 'arc of instability' or 'arc of opportunity'?*, *Global Change, Peace & Security*, 27:1, 39-53, DOI: 10.1080/14781158.2015.992010
- Jon Fraenkel, 2013. *The origins of military autonomy in Fiji: a tale of three coups*. Publisher: Routledge
- Joseph Nye, Jr., *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, (New York: PublicAffairs, 2004), hlm. 1
- Joshua Goldstein, 1999. *International Relations*, (New York: Longman, 1999), 147.
- K.J. Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis*. (New Jersey: Prentice-Hall, 1983) 107. 3 James N. Rosenau. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, (New York: The Free Press, 1969), 167. 4 K. J. Holsti. *Op. Cit.*, 145.
- Karin Ludvigsson, 2010. *Reflections on the Effectiveness of Targeted Sanctions in The Case of Fiji*. Lund University STVM01 Department of Political Science Spring 2010.
- Kelly, Andrew. (2015). *Restoring Democracy: Australian Responses to Military Coups in Fiji*. *Journal of International Studies*. 11. 1-13.
- Kiln. *Ship Map*. accessed 6 February 2018, <https://www.shipmap.org>.
- Lyu Guixia. *China's development aid to Fiji: motive and method*. The Research Centre of the Pacific Island Countries, Liaocheng University, Shandong Province, China.
- Mark Shephard, 2009. *Australia's Nation-Building: An Assessment of its Contribution to Regional Security in the Pacific, and New Policy to Guide its Future*. Dalam the Australian National University Strategic and Defence Studies Centre, Working Paper No.413.
- Martin, M. F. (2012). *U.S. Sanctions on Burma*. Diakses pada September 20, 2018, dari halaman web <https://fas.org/sgp/crs/row/R41336.pdf>.
- Masters, Jonathan. "What Are Economic Sanctions?" CFR.org. 7 August 2017.
- Michael Perry, 2007. *Fiji Coup Leader Promises Democracy by March 2009*. Diakses pada halaman web <https://www.reuters.com/article/us-fiji-elections/fiji-coup-leader-promises-democracy-by-march-2009-idUSSYD28653120071017> diakses pada tgl 19 September 2018.
- Mintz, Alex. Karl Derouen. *Understanding Foreign Policy Making: Decision Making*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Morgan Tuimalealiifano, 2018. *Frank Bainimarama prime minister of Fiji*. publisher Encyclopædia Britannica, inc. diakses pada halaman website <<https://www.britannica.com/biography/Frank-Bainimarama>> pada tanggal 15 April 2019
- Narayan, P.K. (2000). Fiji's tourism industry: A SWOT analysis. *Journal of Tourism Studies*, 11(2), 15-24.
- Paul Kelly & Patrick Walters (27 May 2006). "Back for good". *The Australian*.
- Peter Brown, 2012. *Australian Influence in the South Pacific*. Australian Defence Force Journal, no. 189
- Philippa Brant, 2009. China's involvement in Fiji and Australia and New Zealand's position. dikutip dari artikel <<https://www.eastasiaforum.org>> pada tanggal 30 Maret 2019.

- Radcliffe, Brad. "The Power of Economic Sanctions." Investopedia.com. 18 August 2016.
- Rod McGuirk , 2009. *UN Bars Fijian Peacekeepers in Latest Sanctions*. Diakses pada website <<https://www.un.int>> pada tanggal 30 Maret 2019
- Rukma, Dany & Saiman, 2015. *Intervensi Australia Terhadap Fiji Pasca Kudeta Militer*. (2015). 7(1). Diakses pada halaman web <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/3184> pada tanggal 22 September 2018.
- Samisoni Pareti, *Forum leaders issues Fiji an ultimatum*. Islands Business, February 2009.
- Sekaran, U. (2011). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Snyder, Richard C., H.W Bruck, and Burton Sapin, . *Foreign Policy Decision- Making: An A pproach to the Study of International Politics*. Glencoe: Free Press, 1962. Hal 60
- Stewart Firth, 2018. *Instability In The Pacific Islands: A Status Report*. diakses pada halaman <<https://www.lowyinstitute.org/publications/instability-pacific-islands-status-report#>> pada tanggal 15 mei 2019
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Mulyadi. 2012.
- Susan E. Rice, 2010. *The National Security Implications of Global Poverty" (Chapter I)*, dalam Susan E. Rice, Corinne Graff, dan Carlos Pascual (eds.), *Confronting Poverty: Weak States and U.S. National Security*, (Washington DC: Brookings Institutions, 2010) 68 Ibid.
- Tanya Vitusagavulu, 2013. *Trouble in Paradise : Fiji's Proclivity to Coups. Clocks and Clouds 2013*, VOL. 3 NO.1 diakses pada halaman web <<http://www.inquiriesjournal.com/articles/1603/trouble-in-paradise-fijis-proclivity-to-coups>> pada tanggal 20 September 2018.
- Tarte, Sandra (2010) *Fiji Islands security challenges and defense policy issues. In: Asia Pacific Countries Security Outlook and Its Implications for the Defense Sector*. NIDS Joint Research Series (5). The National Institute for Defense Studies, Tokyo, Japan, pp. 67-84. ISBN 9784939034732
- Theodore, Alison Graham. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown.

#### Artikel :

BBC, 2006. *Background to Fiji's four coup*. Dikutip dari <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6209486.stm>> diakses pada 5 januari 2019 pukul 14:01 WIB.

DW, 2005. *Kudeta militer Fiji*. diakses dari <<http://dw.de/pRoger Maynard,2006. Fiji military seizes power in bloodless coup>> diakses pada halaman web <<https://www.theguardian.com>> [ada tanggal 46 mei 2019

Sunday Times, 2009. *Fiji Booted Out, Pacific Forum's Ruling Cuts Funding*. Diakses pada halaman web <[www.sundaytimes.com](http://www.sundaytimes.com)> pada tanggal 23 September 2018)

Sydney Morning Herald, 2007. *Australia warned Fiji of invasion*. diakses pada halaman web <<https://www.smh.com.au>> pada tanggal 30 April 2019.

